

Uni Eropa dan Indonesia dalam Kerangka Kerjasama IUE-CEPA: Studi Kasus ARISE+

Ahmad Ghufran Akbar

Kata Kunci

indonesia, uni eropa, kepentingan nasional, kerjasama internasional

Abstrak

Kerjasama Uni Eropa (UE) dan Indonesia telah semakin dalam selama bertahun-tahun. Pada bulan Juli 2016, kedua mitra meluncurkan negosiasi untuk membentuk *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IUE-CEPA) dalam rangka memperkuat hubungan ekonomi, meningkatkan perdagangan dan investasi secara keseluruhan dan menciptakan kemakmuran bersama yang berkelanjutan. Salah satu inisiatif unggulan di bawah kerangka kerjasama UE-Indonesia adalah *ARISE Indonesia – Trade Support Facility* (ARISE+) yang bertujuan untuk berkontribusi pada kesiapan Indonesia dan peningkatan daya saing dalam rantai nilai global melalui intervensi di tingkat nasional dan subnasional. Penulis akan membahas tentang ARISE+ beserta manfaatnya dilanjutkan dengan pemaparan keseragaman kepentingan kemudian diakhiri analisis pengaruh ARISE+ terhadap IUE-CEPA dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tulisan ini mendapatkan luaran berupa ARISE+ berpengaruh dalam suksesi implementasi IUE-CEPA.

PENDAHULUAN

Indonesia- European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) secara resmi dimulai pada 18 Juli 2016 dan telah menyelesaikan sembilan putaran pada akhir 2020 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2019). Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan akses dari ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan lebih terbuka dan daya saing produk Indonesia akan meningkat. Tetapi lebih dari itu, makna perjanjian ini semakin relevan dalam konteksnya. Reformasi ekonomi, terutama untuk memulai pemulihan ekonomi di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ekonomi Indonesia mencatat kontraksi 2,07 persen di tahun 2020. Mengingat anggaran pemerintah yang terbatas untuk mendukung pemulihan ekonomi, Indonesia perlu meningkatkan produktivitas negara untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam hal ini, IEU CEPA memberikan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas Indonesia. Melalui implementasi IEU CEPA juga diharapkan, Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik. akses ke pasar sehingga mendorong perdagangan jasa dan investasi yang keduanya memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi. Selain itu, beberapa bagian dari perjanjian mendorong perbaikan peraturan. Reformasi kebijakan ini fokus pada peningkatan iklim bisnis, membangun pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, merumuskan ekonomi yang lebih aman dan tidak diskriminatif kebijakan, dan menerapkan kebijakan perdagangan dan investasi yang lebih terbuka. Reformasi kebijakan ini akan melengkapi berbagai upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia.

Baik Uni Eropa dan Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan negosiasi sesegera mungkin. CEPA sangat penting untuk membantu menghilangkan dan mengurangi tarif karena Indonesia diharapkan menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas dan kemudian akan kehilangan akses ke *General Scheme of Preference (GSP)* UE untuk negara-negara berkembang. Untuk Indonesia, diperkirakan perjanjian tersebut akan meningkatkan kesejahteraan dan PDB masing-masing menjadi € 3,2 miliar dan € 5,2 miliar. Perjanjian tersebut akan meningkatkan kesejahteraan Uni Eropa menjadi € 2,4 miliar dan PDB menjadi € 3,1 miliar pada tahun 2032, menurut *Sustainability Impact Assessment (SIA)* terbaru oleh Komisi Eropa. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat liberalisasi perdagangan yang dicapai dalam perjanjian, semakin besar keuntungan ekonomi yang diharapkan untuk kedua belah pihak. Penghapusan *Non-Tariff Barriers (NTBs)* untuk diperdagangkan tampaknya menjadi kunci dalam menentukan ukuran keuntungan ekonomi yang diharapkan, perhatian khusus harus diberikan pada langkah-langkah *Sanitary and Phyto-Sanitary (SPS)* dan *Technical Barriers to Trade (TBT)*.

Salah satu inisiatif unggulan di bawah kerangka kerja sama UE-Indonesia adalah *ARISE Indonesia – Trade Support Facility (ARISE+)*. *ARISE+*, merupakan salah satu inisiatif unggulan di bawah kerangka kerjasama UE-Indonesia yang bertujuan untuk berkontribusi pada kesiapan Indonesia dan peningkatan daya saing dalam rantai nilai global melalui intervensi di tingkat nasional dan subnasional. Diluncurkan pada tahun 2019 dengan anggaran sebesar € 15 juta,

ARISE Indonesia mencakup bidang prioritas kebijakan perdagangan dan investasi, fasilitasi perdagangan, infrastruktur kualitas ekspor, *Geographical Indications* (GI) dan mendukung partisipasi aktif UKM Indonesia dalam perdagangan internasional, area lintas sektoral yang penting. Selain itu, program ini mendukung pemerintah untuk meningkatkan reformasi kebijakan perdagangan dan rencana pemulihan ekonomi setelah pandemi. Dengan anggaran keseluruhan sebesar € 15 juta, program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia untuk meningkatkan kinerja perdagangan dan daya saing. Melalui tulisan ini penulis akan menjabarkan bagaimana program ARISE+ bisa menjadi peluang dalam menerapkan kepentingan masing-masing antara Uni Eropa dan Indonesia. Penulis akan menjelaskan tentang ARISE+ beserta manfaatnya dilanjutkan dengan pemaparan keseragaman kepentingan masing-masing kemudian diakhiri dengan analisis pengaruh ARISE+ terhadap *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement*.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini dengan arah yang benar, penulis mencantumkan bahan pendukung dalam penelitian ini yakni hasil penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan guna membandingkan atau memperlihatkan persamaan serta perbedaan dari penelitian terdahulu serta penelitian setelahnya. Hal tersebut dibedakan berdasarkan objek yang diteliti, metode penelitian, atau teori serta konsep yang digunakan.

Literatur pertama ditulis oleh Decy Arifinsjah dalam sebuah artikel berjudul “Kajian Kerja Sama Bilateral Indonesia – Uni Eropa di Bidang Ekonomi Dan Keuangan” (Arifinsjah, 2012). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan deskriptif dengan menggunakan analisis dari hasil kumpulan studi kepustakaan, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dan lokakarya/seminar yang melibatkan berbagai pihak terdiri dari berbagai stakeholders diantaranya: perwakilan dari beberapa unit di Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Jendral Imigrasi), unsur bisnis (KADIN, Euro Chamber), dan akademisi, serta Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan kerja sama bilateral Indonesia dan Uni Eropa, khususnya di bidang Ekonomi dan Keuangan, dan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kerja sama tersebut sehingga Indonesia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari kerja sama bilateral di bidang Ekonomi dan Keuangan dengan Uni Eropa.

Hasil yang didapatkan dari penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa peluang dan tantangan peningkatan hubungan ekonomi yang lebih komprehensif antara EU dan Indonesia pada kerjasama pertama adalah *Asia – Europe Meeting* (ASEM), dimana Indonesia berperan aktif dalam setiap pertemuannya. Uni Eropa merupakan partner investasi yang penting bagi

Indonesia. Posisi pinjaman dari negara-negara Uni Eropa ini mencakup 19% dari total pinjaman bilateral Indonesia dengan negara-negara lainnya, tidak termasuk pinjaman dari organisasi regional maupun multilateral. Untuk memaksimalkan potensi hubungan ekonomi bilateral antara UE-Indonesia dan mencapai kemitraan dan kerjasama dalam jangka panjang, maka perlu adanya suatu perjanjian bilateral yang ambisius antara Indonesia dan Uni Eropa. Adanya indikasi *status quo* antara kedua belah pihak telah mengurangi efisiensi hubungan ekonomi dan pemanfaatan potensi ekonomi UE-Indonesia (Arifinsjah, 2012).

Literatur kedua ditulis oleh Yose Rizal Damuri, dkk. dalam sebuah artikel berjudul “Seizing Gains from a Transformative Agreement: A Study on the Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement” (Damuri, et al., 2020). Studi ini menganalisis dampak potensial dari IEU CEPA terhadap perekonomian Indonesia. Dengan metode kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan empiris ke dalam negosiasi IEU CEPA yang sedang berlangsung untuk memaksimalkan manfaat dan untuk mengurangi risiko. Ruang lingkup penelitian ini meliputi perdagangan barang dan jasa, investasi, rantai nilai global, analisis sosial ekonomi serta kebijakan penyesuaian dan strategi optimalisasi. Negosiasi IEU CEPA membuka peluang untuk meningkatkan daya saing nasional dan mendorong reformasi ekonomi yang sangat diperlukan bagi perekonomian Indonesia, terutama untuk mendukung recovery ekonomi setelah pandemi Covid-19.

Hasil yang didapatkan dari penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwasanya hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa belum mencapai titik optimal. Daya saing Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi telah *stagnan* dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini. IEU CEPA dapat menjadi salah satu faktor pendorong pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya proteksionisme, IEU CEPA berpotensi menjadi katalisator reformasi ekonomi yang komprehensif di Indonesia. Hal ini sejalan dengan kebutuhan mendesak Indonesia, khususnya untuk memperbaiki regulasi dan iklim usaha. Oleh karena itu, IEU CEPA memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dalam hal perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi (Damuri, et al., 2020).

KERANGKA PEMIKIRAN

Konsep Kepentingan Nasional

Istilah "kepentingan nasional" telah digunakan oleh negarawan sejak berdirinya negara-bangsa untuk menggambarkan aspirasi dan tujuan entitas berdaulat di wilayah internasional (Neuchterlein, 1976). Sejarah konsep 'kepentingan', yang dipahami sebagai alat diplomatik, menelusuri kembali akarnya pada tahap awal evolusi negara modern di Italia dan Inggris sekitar abad keenam belas dan ketujuh belas. Salah satu pemikir paling awal dari teori-teori modern dalam hal ini adalah Nicolo Machiavelli. Dalam bukunya yang paling terkenal, *The Prince*,

Machiavelli meramalkan munculnya minat sebagai prinsip pengorganisasian untuk berpikir tentang hubungan internasional, dalam dua cara penting: pertama, pangeran harus tahu kapan tidak gunakan kekuasaan, serta kapan menggunakannya (Clinton, 1994). Sarjana lain yang berkontribusi pada pendekatan kepentingan nasional adalah Clausewitz. Menurutnya, semua perilaku negara dimotivasi oleh kebutuhannya. Untuk bertahan hidup dan makmur. "Untuk melindungi kepentingannya, negara-negara harus secara rasional memutuskan untuk berperang. Namun, pada akhirnya perang, jika bodoh, karena tidak melayani kepentingan nasional" (Clausewitz, 1976).

Hans J. Morgenthau melihat dua tingkat kepentingan nasional: vital (primer) dan sekunder. Menurutnya, untuk melestarikan yang pertama, yang menyangkut keberadaan fisik fundamental negara, tidak akan ada kompromi atau ragu-ragu untuk pergi berperang. Semua negara harus membela kepentingan ini dengan harga berapa pun (Marleku, 2013). Dia yakin bahwa kepentingan nasional relatif mudah didefinisikan untuk setiap keamanan negara sebagai negara yang bebas dan independen dan perlindungan terhadap institusi, orang, dan nilai-nilai fundamental dalam sebagian besar kasus dianggap penting bagi setiap negara, baik itu kecil atau besar (1962). Di sisi lain, kepentingan sekunder, kepentingan yang mungkin berusaha untuk bernegosiasi atau berkompromi, adalah lebih sulit untuk didefinisikan. Biasanya, mereka berada di luar kategori pertama dan tidak mewakili ancaman terhadap kedaulatan negara. Secara potensial, Morgenthau percaya bahwa kepentingan ini dapat tumbuh di benak negarawan sampai mereka tampaknya menjadi vital. (Roskin, 1994).

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas tentang kepentingan-kepentingan yang dibawa masing-masing pihak baik Indonesia maupun Uni Eropa dalam melaksanakan kerjasama *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama beberapa dekade terakhir, Uni Eropa dan Indonesia telah berhasil memperkuat dan memperluas kerja sama mereka, yang didukung oleh tujuan bersama dan kepentingan bersama. Sebagai anggota G20, mereka bersekutu dengan negara-negara lain untuk mengatasi masalah keuangan, sosial-ekonomi, dan pembangunan global. Sejak 2014, mereka telah meningkatkan hubungan bilateral mereka ke fase baru dengan berlakunya *Partnership Cooperation Agreement* untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif, mempromosikan tata kelola yang baik, melindungi lingkungan, melawan dampak perubahan iklim, mendukung masyarakat sipil dan mempromosikan pendidikan dasar di antara tujuan lainnya. Beberapa manfaat bersama dari kerja sama yang ditingkatkan telah terwujud melalui perluasan perdagangan dan investasi. Perdagangan barang antara kedua mitra naik sekitar EUR 15 miliar pada 2009 menjadi EUR 24 miliar pada 2019, peningkatan rata-rata 4,8% per tahun (Damuri et al., 2020). Arus investasi langsung dari UE ke Indonesia tumbuh dengan sangat cepat selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 Uni Eropa adalah sumber investasi terbesar kedua ke Indonesia dengan sekitar

EUR 34 miliar saham *Foreign Direct Investment*. Dalam pandangan untuk menciptakan lebih banyak peluang perdagangan serta investasi untuk bisnis dan orang-orang di dua zona ekonomi, Uni Eropa dan Indonesia sedang menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas, juga dikenal sebagai *Indonesia- European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) sejak 2016.

Urgensi IEU-CEPA

Ada beberapa bidang kerja sama ekonomi di IEU-CEPA. Mereka diharapkan dapat meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua belah pihak. Kerja sama tidak terbatas pada perdagangan barang dan jasa tetapi juga termasuk memfasilitasi investasi, mempercepat transfer teknologi dan meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya akan lebih mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Percepatan pembangunan ekonomi menjadi semakin penting di tengah krisis yang ditimbulkan oleh Covid-19. Perdagangan dan investasi juga mengalami penurunan karena turunnya permintaan dan kecenderungan pelaku usaha untuk mengurangi aktivitas akibat pandemi dan ketidakpastian. Dengan vaksin dan peraturan yang lebih ketat pada tahun 2021, diharapkan penyebaran Covid-19 akan lebih mudah dikelola. Tetapi bahkan dengan wabah yang terkendali, pemulihan ekonomi masih akan menantang dan membutuhkan waktu. Bank Dunia memperkirakan bahwa potensi output ekonomi dunia dalam jangka panjang akan berada di bawah tingkat jika pandemi tidak terjadi. Potensi pertumbuhan rata-rata untuk periode 2020-2029, yang sebelum pandemi diperkirakan mencapai 2,1%, turun menjadi 1,9% (Bank Dunia, 2021). Hingga 2025, ekonomi dunia akan kehilangan 5% dari potensi output, bahkan dengan asumsi bahwa pemulihan ekonomi dimulai pada 2021. Dalam skenario terburuk, potensi kerugian output bisa mencapai lebih dari 11%. Hal yang sama berlaku untuk perekonomian Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2024, PDB Indonesia akan mencapai 10% lebih rendah karena krisis. Pemulihan ekonomi perlu didukung oleh kebijakan makroekonomi, dengan intervensi fiskal dan moneter yang kondusif (European Union, 2021).

Dengan dukungan anggaran pemerintah sebesar Rp 619 triliun dan defisit hingga 5,7 persen pada 2021, pemulihan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan berlangsung lebih cepat. Tetapi dalam jangka panjang, sulit untuk mengharapkan bahwa anggaran pemerintah dapat mempertahankan defisit besar untuk terus mendukung pemulihan ekonomi. Ekonomi harus mampu mencapai produktivitas yang lebih tinggi agar tumbuh lebih cepat dan menopang pemulihan ekonomi (Damuri, et. al, 2020). Untuk itu, reformasi kebijakan harus segera dilaksanakan. Reformasi ini harus mencakup peningkatan iklim bisnis dan rezim perizinan investasi, menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih pasti dan tidak diskriminatif, dan menerapkan kebijakan perdagangan dan investasi yang lebih terbuka. Reformasi kebijakan ini akan melengkapi berbagai upaya peningkatan infrastruktur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang telah dilakukan selama ini. Pentingnya IEU CEPA dapat dilihat dalam konteks reformasi untuk mendukung pemulihan

ekonomi. Selain meningkatkan akses pasar untuk produk Indonesia di Uni Eropa, yang berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia, perjanjian ini juga akan menawarkan peluang sesuai dengan kebutuhan Indonesia dalam melakukan reformasi kebijakan. Selain itu, perjanjian ini akan mempengaruhi perdagangan jasa serta investasi yang akan menjadi bagian penting dari pemulihan ekonomi. Beberapa bagian dari perjanjian juga akan mendorong perbaikan dalam kerangka peraturan dan kebijakan.

ARISE Indonesia Trade Support Facility and Programme

ARISE Indonesia – Trade Support Facility (ARISE Indonesia) merupakan salah satu inisiatif unggulan di bawah kerangka kerja sama UE-Indonesia 2014- 2020. Ini juga merupakan bagian dari kerangka kerja sama keseluruhan antara UE di satu sisi dan Sekretariat ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN di sisi lain. Sementara ARISE Indonesia terutama berfungsi untuk memperkuat kerja sama UE-Indonesia, implementasinya dikoordinasikan dengan agenda integrasi ekonomi ASEAN. ARISE Indonesia adalah intervensi tingkat negara yang melengkapi Program Regional ARISE Plus, yang sesuai dengan *ASEAN Economic Community Blue-Print 2025* (ARISE+ Indonesia, n.d.). Program ARISE tingkat negara ada di beberapa negara anggota ASEAN. Dengan anggaran keseluruhan sekitar EUR 15 juta, ARISE Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia untuk meningkatkan kinerja perdagangan dan daya saing. Hal ini dilaksanakan melalui dua proyek bantuan teknis komplementer. Bantuan teknis pertama, dengan anggaran sekitar EUR 9 juta, diluncurkan pada 2019 untuk periode implementasi empat tahun. Pelaksanaan bantuan teknis kedua dimulai pada 2 Agustus 2021 untuk jangka waktu dua setengah tahun dan anggaran sekitar EUR 4,7 juta. ARISE Indonesia merespon prioritas Pemerintah Indonesia sesuai agenda yang ditetapkan bersama UE dalam kerangka kerja samanya. Program ini mendukung lembaga pemerintah dalam menerapkan dan meninjau kebijakan terkait perdagangan dan investasi yang ada secara lebih efektif dan dalam menguraikan kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan peluang bisnis bagi perusahaan Indonesia. Secara khusus memberikan bantuan teknis kepada lembaga-lembaga terkait dalam mempertajam keahlian mereka untuk menegosiasikan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan UE. Dukungan juga diberikan kepada usaha kecil dan menengah untuk memfasilitasi partisipasi mereka yang lebih aktif dalam perdagangan internasional dan untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan (ARISE+ Indonesia, n.d.).

Tujuan Implementasi Program ARISE+ Indonesia

Adapun beberapa tujuan dari diberlakukannya program ini adalah:

- (1) Memperkuat kapasitas kelembagaan Indonesia. Melalui ini diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap proses perencanaan pembangunan nasional serta memperkuat kapasitas kelembagaan Indonesia untuk mengkoordinasikan dan menerapkan kebijakan perdagangan dan investasi (ARISE+ Indonesia, n.d.).
- (2) Fasilitasi perdagangan. Mendukung Indonesia dalam melaksanakan tujuan kebijakannya sehubungan dengan *Trade Facilitation Agreement (TFA) World Trade Organisation (WTO)* dan masalah fasilitasi perdagangan yang lebih luas, dan meningkatkan keahlian dan keterampilan teknis untuk menangani kasus-kasus pemulihan perdagangan yang kompleks
- (3) Peningkatan kualitas infrastruktur ekspor. Menyelaraskan prosedur untuk pengembangan dan adopsi standar dan penyusunan peraturan teknis dengan standar internasional dengan maksud untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.

Keseragaman Kepentingan Indonesia dan Uni Eropa

Dengan hubungan berdasarkan seperangkat nilai bersama, termasuk promosi dan perlindungan demokrasi, pluralisme, manusia hak dan lingkungan. Indonesia, sebagai tuan rumah Sekretariat ASEAN, berfungsi sebagai jalur ke wilayah tersebut dan mendukung integrasi regional dan kemitraan wilayah-ke-wilayah. *Partnership Comprehensive Agreement (PCA)* mulai berlaku pada Mei 2014, Uni Eropa dan Indonesia terus menguatkan dan mengembangkan hubungan mereka (Pambudhi, et al., 2014). Didasarkan pada keberhasilan hal tersebut keduanya kemudian melanjutkannya pada negosiasi CEPA yang dilakukan pada tahun 2016.

Dalam melaksanakan kerjasama, keduanya memiliki keseragaman kepentingan dalam beberapa hal yang telah penulis rangkum sebagai berikut.

Perdagangan Barang

Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar kelima di Indonesia. pada tahun 2020. Perdagangan bilateral barang sebesar € 20,6 miliar pada tahun 2020, dengan ekspor UE senilai € 7,2 miliar dan impor senilai € 13,4 miliar. Sementara Indonesia adalah mitra dagang global ke-31 untuk Uni Eropa. dan mitra UE kelima di ASEAN. Untuk Uni Eropa, Indonesia adalah sumber impor terbesar ke-25 dan ekspor terbesar ke-33 di tahun 2020. Lebih dari setengah perdagangan UE-Indonesia terdiri dari menengah barang yang digunakan sebagai input untuk proses produksi lebih lanjut baik dalam Indonesia dan Eropa. Sekitar 40% dari ekspor Indonesia Ke UE adalah barang-barang konsumen. Di ASEAN, Indonesia mitra dagang terbesar kelima di UE., setelah Vietnam, Singapura, Malaysia dan Thailand, menyarankan ruang yang cukup untuk pertumbuhan. Pada akhirnya dekade, nilai perdagangan barang dagangan antara Uni Eropa dan Indonesia

meningkat sebesar 12% sementara perdagangan barang antara Uni Eropa dan ASEAN meningkat lebih dari setengah menjadi € 189 milyar (European Union, 2021).

Berikut adalah begitu banyak potensi ekonomi keuntungan yang dapat diperoleh dengan bermitra begitu erat dengan UE sebagai kontributor sebesar 23 persen dari PDB dunia dan 7,3 persen dari populasi global, UE menawarkan potensi pasar yang bermanfaat bagi Indonesia. Visi Group (2011) melaporkan bahwa ada tambahan 0,1 persen dari pertumbuhan PDB Indonesia dalam jangka pendek, dan 1,3 persen dalam PDB Indonesia dalam jangka panjang sebagai dampak implementasi IUE CEPA. Di sampingnya dampak terhadap PDB, juga meningkatkan produksi industri ringan sebanyak 5%, serta perdagangan saldo meningkat sekitar 2 miliar USD, dan secara keseluruhan upah mengalami kenaikan 1,5%. Selain itu, yang komprehensif perdagangan dan investasi liberalisasi juga akan menjadi pengentasan kemiskinan (Vision Group Report, 2011).

Selanjutnya, IEU CEPA diharapkan dapat mengurangi berbagai hambatan perdagangan sehingga produk Indonesia akan menjadi lebih kompetitif dan terdiversifikasi. IEU CEPA dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui akses terhadap input berkualitas yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri, terutama di sektor manufaktur. Partisipasi Indonesia dalam perjanjian ini juga penting untuk mempertahankan daya saingnya di pasar UE dan mencegah penurunan kuantitas lebih lanjut dari pangsa pasarnya karena persaingan dengan negara lain. Selain itu, IEU CEPA diharapkan mampu memberikan peluang diversifikasi produk sehingga ketahanan ekspor Indonesia akan diperkuat. Diversifikasi ekspor Indonesia semakin meningkat mendesak mengingat *stagnasi* ekspor komoditas negara ke UE dan dunia pasar.

Perdagangan Jasa

Perdagangan bilateral dalam jasa antara Indonesia dan Uni Eropa di 2019 sebesar € 7,5 miliar (meningkat 13,6% dibandingkan hingga 2018), dengan UE mengekspor € 5,3 miliar dan mengimpor € 2,2 miliar. Indonesia secara konsisten menjadi importir bersih dari jasa Eropa. Ekspor layanan UE ke Indonesia di 2019 terutama di sektor-sektor berikut: layanan bisnis (€ 2,2 miliar), transportasi (€ 1,3 miliar), telekomunikasi, komputer, dan layanan informasi (€ 0,7 miliar) (European Union, 2019).

Dalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa, perdagangan jasa ini adalah aspek penting. Indonesia secara konsisten merupakan importir layanan dari Uni Eropa. Indonesia mengimpor beberapa layanan dari UE dalam jumlah yang cukup besar, seperti transportasi, komunikasi, komputer dan teknologi informasi, keuangan dan lainnya. Hal ini sejalan dengan karakteristik perekonomian Indonesia yang membutuhkan beberapa fasilitas untuk mendukung kegiatan ekonomi. Rendahnya proporsi layanan

dalam ekspor Indonesia kemungkinan akan menjadi salah satu faktor. di balik rendahnya daya saing produk ekspor negara. Analisis dari permintaan dan penawaran jasa di Indonesia menunjukkan bahwa ada kelebihan permintaan yang tinggi untuk berbagai layanan penting seperti telekomunikasi, transportasi, keuangan serta layanan dukungan bisnis dan administrasi. Tanpa ketersediaan yang memadai, produksi dan kegiatan ekonomi tidak akan optimal, sementara produktivitas akan rendah. Akibatnya, produk Indonesia cenderung tidak mampu bersaing di pasar dunia. Impor jasa, khususnya dari negara-negara penghasil layanan berkualitas tinggi seperti Uni Eropa, sangat penting dan bermanfaat bagi perekonomian (Damuri, et al., 2020).

Namun, impor jasa cukup terbatas. *Services Trade Restriction Indicators* (STRI) menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pembatasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Negara. Pembatasan ini terutama dalam bentuk pembatasan masuknya layanan luar negeri. penyedia yang membuat penyediaan layanan lebih sulit dalam perekonomian Indonesia. IEU CEPA membuka peluang bagi Indonesia untuk bisa memanfaatkan perdagangan jasa lebih optimal (Pambudhi, et al., 2014).

Federal Direct Investment (FDI)

Investasi Uni Eropa di Indonesia telah meningkat terus sepanjang tahun. Pada 2019, nilai saham FDI UE di Indonesia adalah € 25,8 miliar, meningkat hampir 40% dibandingkan dengan 2013. Peningkatan ini meskipun penggalan pada tahun 2019 sebesar € 10 miliar. Uni Eropa tetap berada di empat sumber investor asing teratas di Indonesia dan investor non-Asia terkemuka. Indonesia adalah tujuan kedua untuk investasi Uni Eropa di kawasan ini setelah Singapura, menyumbang 8,2% dari total saham FDI UE di ASEAN. Ini menunjukkan ruang yang cukup untuk pertumbuhan karena Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN. Perusahaan Uni Eropa terutama berinvestasi di sektor-sektor dengan produk atau kegiatan bernilai tambah tinggi seperti di bidang manufaktur (terutama bahan kimia dan obat-obatan), transportasi, penyimpanan dan komunikasi, infrastruktur utilitas, dan layanan pertambangan (Pambudhi, et al., 2014).

Indonesia-EU CEPA menempatkan investasi sebagai salah satu tujuan yang paling penting. Perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan aliran investasi asing langsung ke Indonesia, serta menjadi platform ekspor dan impor bagi Indonesia. Berkenaan dengan potensi investasi, ada kemungkinan yang cukup besar untuk peningkatan ekspor dari Indonesia ke UE ketika Indonesia menerima arus masuk FDI yang lebih tinggi dari UE, dan sebaliknya. Salah satu penjelasan yang mungkin untuk ini adalah bahwa investor asing yang berasal dari UE akan cenderung berinvestasi di sektor-sektor yang memiliki ekspor signifikan ke negara-negara UE. Hal ini terkait dengan jenis atau motif investasi yang masuk ke Indonesia, yang sebagian besar cenderung investasi

vertikal, bukan investasi horizontal. Selain itu, perusahaan yang berinvestasi di Indonesia juga mendapat manfaat dari mampu mengimpor barang input berkualitas atau suku cadang dan komponen dari Uni Eropa. Perusahaan-perusahaan ini juga dapat mengakses pasar yang lebih besar, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara ASEAN dan Asia Timur lainnya yang memiliki kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.

KESIMPULAN

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Uni Eropa sedang mencari konsesi preferensial dengan ASEAN. Ketika konsultasi regional tidak ke mana-mana, negosiasi bergeser ke arah konsesi bilateral yang menargetkan masing-masing negara anggota ASEAN dengan harapan bahwa setiap perjanjian bilateral dapat diselaraskan suatu hari nanti. Negosiasi berjalan dengan baik dengan beberapa negara ASEAN, seperti Singapura, Thailand, Malaysia. Bahkan Singapura sedang memasuki tahap ratifikasi perjanjian CEPA. Namun demikian, ada beberapa masalah mendasar. Melekat dalam IUE CEPA jika ingin dinegosiasikan. Meskipun ada prospek positif keseluruhan dari IUE CEPA, pemerintah serta sektor swasta di Indonesia khawatir bahwa sebagai tingkat pembangunan antara UE dan Indonesia berbeda secara signifikan, manfaat CEPA akan lebih mungkin bias terhadap sisi Uni Eropa, sementara Indonesia akan menjadi satu-satunya menanggung sebagian besar biaya penyesuaian. Ini adalah sebuah kekhawatiran dalam konteks bahwa akan jauh lebih mudah bagi UE untuk menembus ke pasar Indonesia daripada untuk Indonesia untuk memasuki pasar UE, sebagai produsen.

Selain menimbulkan beberapa tantangan yang menarik, IUE CEPA juga apabila ditahan kemungkinan akan menjadi kerugian bagi Indonesia. Ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sepenuhnya direalisasikan, negara-negara ASEAN akan terintegrasi secara ekonomi asasi basis produksi tunggal yang membuat melakukan bisnis intra-regional tampak seperti domestik, karena hambatan ekonomis minimal. Perusahaan-perusahaan Uni Eropa akan merasa lebih kompetitif untuk membangun pabrik di mana lebih murah untuk mengimpor bahan baku dan ada jaminan untuk perlindungan dan insentif investasi preferensial. Itu semua dimungkinkan jika seseorang menghalangi perjanjian FTA / CEPA dengan UE yang bertujuan untuk menghilangkan bea cukai yang substansial dan meliberalisasi akses investasi pasar. Jika UE ingin memuaskan pasar yang berasal dari negara-negara ASEAN lainnya yang belum memiliki CEPA, mengeksport di bawah tarif nol, skema di MEA adalah solusi yang lebih disukai bagi mereka, daripada diganggu dengan mendirikan pabrik di mana permintaan domestik ada. Dalam hal ini, Indonesia akan meningkatkan momentum peningkatan investasi dan perdagangan tanpa ada kemauan politik yang kuat untuk melanjutkan negosiasi CEPA.

Dengan tidak bergerak maju dengan perjanjian CEPA ini, hambatan perdagangan dan investasi antara kedua negara masih akan tetap ada dan tidak ada peningkatan ekonomi yang

akan dilakukan. Namun, IUE CEPA menawarkan dukungan yang signifikan bagi Indonesia untuk menegosiasikan negara-negara yang ada dan mengubahnya menjadi ekonomi yang saling menguntungkan yang akan meningkatkan kedua kondisi ekonomi. Dalam hal ini, yang terbaik adalah melihat tantangan sebagai alat negosiasi alih-alih faktor-faktor yang menghambat. Indonesia kemungkinan dapat menerima proposal Uni Eropa dengan imbalan menurunkan hambatan teknologi dan perlindungan domestik di UE serta peningkatan kapasitas untuk sektor swasta dan pemegang kebutuhan yang relevan. Langkah ini akan jauh lebih baik daripada hanya menolak atau menahan diri darinya, karena sektor-sektor yang lebih diuntungkan, dalam istilah yang nyata dan adil, dari peningkatan akses pasar dan bisnis, sehingga meningkatkan penerimaan politik dan membangun citra positif IUE CEPA.

REFERENSI

- ARISE+ Indonesia. (n.d.-a). Aligning procedures for the development and adoption of standards and the preparation of technical regulations with international standards with the view to increase Indonesia's export competitiveness. Retrieved Desember 11, 2021, from <https://ariseplus-indonesia.org/en/priority/export-quality-infrastructure.html>
- ARISE+ Indonesia. (n.d.-b). Strengthening Indonesia's institutional capacities to coordinate and implement trade and investment policies. Retrieved Desember 11, 2021, from <https://ariseplus-indonesia.org/en/priority/trade-investment-policy.html>
- ARISE+ Indonesia. (n.d.-c). Supporting Indonesia in implementing its policy objectives with regard to the World Trade Organisation (WTO) Trade Facilitation Agreement (TFA) and broader trade facilitation issues, and enhancing technical expertise and skills to handle complex trade remedy cases. Retrieved Desember 11, 2021, from <https://ariseplus-indonesia.org/en/priority/trade-facilitation.html>
- CNN Indonesia. (2021, February 9). Kemendag Akan Selesaikan 11 Perjanjian Dagang Tahun Ini. Retrieved Desember 11, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210209113824-92-604078/kemendag-akan-selesaikan-11-perjanjian-dagang-tahun-ini>
- European Union. (2019). Blue Book 2019 EU-Indonesia: Together for Sustainable Development. https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eu-indonesia_blue_book_2019.pdf
- European Union. (2021a). European Union Trade and Investment with Indonesia 2021. https://eeas.europa.eu/delegations/russia/104741/eu-indonesia-trade-investment-2021_ru
- European Union. (2021b, September 21). EU-Indonesia Investment Dialogue highlights Post-Pandemic Economic Recovery. Retrieved Desember 11, 2021, from https://eeas.europa.eu/delegations/russia/104500/eu-indonesia-investment-dialogue-highlights-post-pandemic-economic-recovery_ru

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (2019, December 30). Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement Masuki Putaran ke-9. Retrieved Desember 11, 2021, from <https://migas.esdm.go.id/post/read/indonesia-european-union-comprehensive-economic-partnership-agreement-masuki-putaran-ke-9>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 di Atas Rata-Rata Negara di Asia Tenggara. Retrieved Desember 10, 2021, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tahun-2020-di-atas-rata-rata-negara-di-asia-tenggara/>
- Marleku, A. (2013). National Interest and Foreign Policy: The Case of Kosovo. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. Published. <https://doi.org/10.5901/mjss.2013.v4n3p415>
- Pambudhi, P. A., Laksono, R., Situmorang, R., Savitri, D. M., Astri Karniani, M., A., & Handoko, W. (2014). In Facing the Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement: Perspective from Indonesia's Business Sector (Vol. P.001/DPN-EUKAJ-I/2014). APINDO-EU ACTIVE. https://apindo.or.id/userfiles/publikasi/pdf/Doc_1._Full_Paper_ACTIVE_.pdf
- Rizal Damuri, Y., Rafitrandi, D., Friawan, D., B Hirawan, F., Aswicahyono, H., S Titiheruw, I., & J Barany, L. (2021). Seizing Gains from a Transformative Agreement: A Study on the Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement. Centre for Strategic and International Studies. https://eeas.europa.eu/delegations/russia/98038/study-indonesia-eu-comprehensive-economic-partnership-agreement_ru